

SKRIPSI

**PENGATURAN TERHADAP KAWASAN UDARA TERBATAS
(*RESTRICTED AREA*) MENURUT HUKUM NASIONAL DAN
INTERNASIONAL**



DISUSUN OLEH

NAMA : ESTIANA FAUZI
BP : 0910112232
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
PEMBIMBING I : DR. JEAN ELVARDI, SH., MH
PEMBIMBING II : DEWI ENGGRIYENI, SH., MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2017

	No. Alumni Universitas	ESTIANA FAUZI	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Padang, 18 Januari 1991 b) Nama Orang Tua : (alm) Fauzi Said dan Ariati c) Fakultas : Hukum d) PK : Hukum Internasional (PK VII) e) No. BP : 0910112232 f) Tanggal Lulus : 19 Januari 2017	g) Predikat Lulus : Memuaskan h) IPK : 3,19 i) Lama Studi : 7 Tahun 0 Bulan j) Alamat : Padang	

**PENGATURAN TERHADAP KAWASAN UDARA TERBATAS (*RESTRICTED AREA*)
MENURUT HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL**



(Estiana Fauzi, 0910112232, Program Kekhususan Hukum Internasional, Universitas Andalas, 65 Halaman, Tahun 2017)

ABSTRAK

Sebuah negara memiliki kekuasaan yang mutlak dan istimewa atas wilayah udara di atasnya. Negara yang berdaulat memiliki hak untuk mengatur rute terbang dan wilayah udaranya yang berhubungan erat dengan pertahanan dan keamanan negara. Pelanggaran terhadap kawasan udara terbatas oleh pesawat domestik maupun pesawat asing seringkali terjadi. Permasalahannya adalah 1) Bagaimanakah pengaturan *restricted area* menurut hukum nasional dan internasional? 2) Bagaimanakah upaya hukum yang dilakukan atas pelanggaran *restricted area* di Indonesia? Pendekatan masalah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan konvensi-konvensi, pendekatan sejarah dan pendekatan perbandingan antara keinginan dan capaian. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 2) *Chicago Convention on International Civil Aviation 1944*. 3) *Paris Convention Relating of the Regulation of Aerial Navigation 1919*. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum nasional maupun hukum internasional kurang tegas dalam menentukan sanksi hukum bagi pesawat udara yang melanggar. Hal ini dapat menimbulkan masalah yang serius terkait dengan kerugian atas keamanan negara.

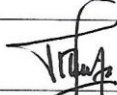
Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 19 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	Dr. Syofirman Syofyan, S.H. M.H.	Zimtya Zora S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Internasional : **Hj. Magdariza S.H., M.H**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :		Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas :		Nama:	Tanda Tangan: